

PROWITRA SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT

Muhammad Akmal Agustira

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit rakyat berkembang begitu pesat. Namun perkembangan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan kesenjangan program pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan pemerintah belum dirasakan langsung oleh pekebun rakyat terutama oleh pekebun swadaya. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebagai pusat unggulan iptek memiliki Program Sawit Rakyat (Prowitra) sebagai alternatif pengembangan dalam upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui kondisi perkebunan rakyat dan kendala pekebun rakyat mencapai produktivitas tinggi kelapa sawit, serta membantu upaya peningkatan produktivitas dan usaha perkebunan yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan pekebun. Hasil penelitian melalui kegiatan *prowitra* menunjukkan bahwa terdapat 4 permasalahan utama pada perkebunan rakyat yaitu penggunaan benih palsu, kurangnya penerapan *Best Management Practice* (BMP), lemahnya kelembagaan perkebunan rakyat, dan terhambatnya replanting. Untuk itu *prowitra* melakukan 4 program kegiatan yaitu sosialisasi dan peningkatan akses benih unggul, penerapan BMP secara terpadu dan berkelanjutan, penguatan kelembagaan dan pembinaan replanting. Kunci sukses pelaksanaan *prowitra* adalah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan pekebun rakyat. Disamping itu, peran penguatan kelembagaan perkebunan rakyat sangat berperan penting dalam pengefektifan diseminasi teknologi, pemberdayaan pekebun, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun rakyat.

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Muhammad Akmal Agustira (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
e-mail :agustira_akmal@yahoo.com

Kata kunci : *Prowitra, kelapa sawit, rakyat, produktivitas.*

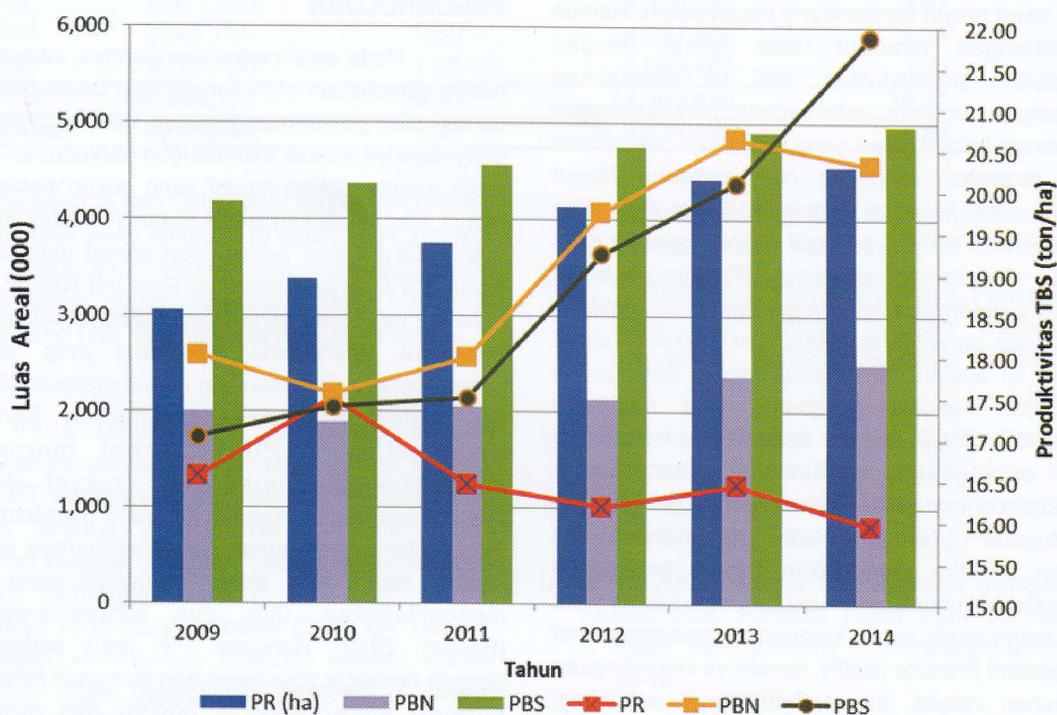
PENDAHULUAN

Pada awal perkembangannya, kelapa sawit hanya diusahakan oleh perusahaan besar baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu penyebabnya adalah membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang cukup besar yang hanya bisa dilakukan perusahaan (Koentjoroningrat, 1997). Cikal bakal perkebunan rakyat dimulai pada tahun 1977 dimana dibentuk Pola Inti Rakyat (PIR). Pola PIR ini berkembang dalam berbagai pola meliputi PIR-Lokal, PIR-khusus, PIR-Trans yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun dananya dari pemerintah melalui Departemen Pertanian. Konsepsi pola PIR tersebut merupakan pengembangan perkebunan rakyat dimana perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kemitraan yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Badrun, 2010). Konsepsi PIR terus berkembang dengan berbagai pola kemitraan termasuk pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan revitalisasi perkebunan (Rahman, 2015).

Seiring dengan perkembangan waktu dan prospek kelapa sawit yang cukup menjanjikan, rakyat di sekitar perkebunan besar pun mulai dapat belajar menanam kelapa sawit secara swadaya. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit Indonesia 4,4 juta ha (44.11%) (ditjenbun, 2014) dan memiliki peran strategis tidak hanya bagi industri kelapa sawit Indonesia, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pengembangan kelapa sawit. Namun peranan perkebunan kelapa sawit tersebut masih belum optimal. Rendahnya produktivitas menjadi permasalahan utama pada perkebunan rakyat.

Berdasarkan data Ditjenbun 2014, produktivitas minyak sawit Indonesia dari perkebunan rakyat pada tahun 2014 sebesar 3,19 ton CPO/ha jauh lebih rendah dari potensi produksi kelapa sawit yang mencapai 8-9 ton CPO/ha (Lubis, 2008). Jika diasumsikan rata-rata rendemen minyak sawit nasional sebesar 20%, maka estimasi produktivitas kebun kelapa sawit rakyat rata-rata pada tahun 2014 hanya sebesar 15,95 ton TBS/ha/tahun (Gambar 1). Pada kenyataannya, rendemen minyak sawit untuk

perkebunan rakyat banyak yang tidak mencapai 20%. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah sehingga pengembangan kelapa sawit rakyat di sentra perkebunan kelapa sawit belum optimal dalam peningkatan kesejahteraan. Disamping itu, implikasi lain adalah terdapat kecenderungan penambahan areal kelapa sawit terutama pada lahan marginal seperti lahan gambut, pasang surut dan berbukit yang tentunya jauh dalam penerapan kelapa sawit yang berkelanjutan.



Gambar 1. Perkembangan luas areal dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat disebabkan oleh banyak faktor yaitu rendahnya penggunaan benih unggul, minimnya pengetahuan pekebun rakyat mengenai kultur teknis kelapa sawit maupun lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan modal (Agustira dan Amalia, 2012). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan berbagai program diantaranya program revitalisasi perkebunan, program penggantian bibit palsu, maupun berbagai program penyuluhan perkebunan. Namun program-program tersebut belum dirasakan secara langsung kepada pekebun rakyat. Banyaknya pekebun rakyat yang

mengeluh masih kesulitan mendapatkan benih unggul dan minimnya kegiatan penyuluhan secara langsung dan berkala membahas permasalahan mereka dalam melaksanakan kultur teknis.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sebagai salah satu pusat penelitian memiliki komitmen dalam pemantapan inovasi dan diseminasi teknologi dalam memberdayakan pekebun rakyat memiliki Program Sawit Untuk Rakyat (Prowitra). Prowitra merupakan program pendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Kegiatan dari program ini meliputi diseminasi penggunaan benih

unggul dan penerapan *Best Management Practices* (BMP) untuk peningkatan produktivitas dan berkelanjutan. Tujuan penulisan makalah ini adalah mengetahui kondisi perkebunan rakyat dan kendala pekebun rakyat mencapai produktivitas kelapa sawit, serta peranan Prowitra dalam membantu upaya peningkatan produktivitas dan usaha perkebunan yang berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan pekebun

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam Prowitra adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). PRA adalah metode pendekatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat/pekebun dalam menganalisa kondisi dan permasalahan sehingga dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Chambers, 1992). Metode ini tidak hanya saja meninjau tetapi melibatkan proses dengan mengetahui permasalahan dan kebutuhan pekebun, menerapkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan. PRA dalam prowitra yaitu proses pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat secara partisipasif terkait dengan permasalahan yang dihadapi, merumuskan perencanaan, dan pelaksanaan program secara nyata.

Kegiatan ini dibantu dengan mobil keliling yang melakukan kunjungan ke sentra perkebunan rakyat di seluruh provinsi Sumatera. Sample pekebun diambil secara purposive di setiap provinsinya sebanyak 25 orang sehingga diperoleh 225 responden pekebun rakyat. Pengumpulan data dilakukan dengan

Focus Group Discussion (FGD), *key informant* dan *survey*. Masalah atau kondisi pekebun rakyat dianalisis melalui *cause effect analysis*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merupakan institusi yang memegang mandat nasional untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kelapa sawit. Dalam tugas dan fungsinya PPKS berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan hasil penelitiannya (diseminasi) untuk kemajuan industri kelapa sawit. Sebagai pusat acuan teknologi di bidang perkelapasawitan, PPKS harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu permasalahan terbesar yaitu masih rendahnya produktivitas yang sangat rendah pada perkebunan rakyat.

Sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh PPKS yaitu meluncurkan program sawit rakyat (PROWITRA) pada tahun 2010. Program sawit rakyat (Prowitra) adalah program pendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas melalui sosialiasi dan diseminasi teknologi penerapan kultur teknis yang tepat dan berkesinambungan melalui pendekatan dan pemberdayaan petani secara partisipasif. Nilai program ini didasarkan pada sikap melayani, mendidik dan mendampingi. Moto prowitra yaitu PPKS datang petani senang. Nilai dan moto prowitra ini memiliki arti bahwa semua kegiatan PPKS bersifat melayani apa saja yang menjadi permasalahan pekebun rakyat secara partisipasif, mendidik pekebun rakyat secara mandiri dan mendampingi dalam pemberdayaan. Saat ini PPKS telah melakukan 82 kegiatan pada 9 provinsi (tabel 1).

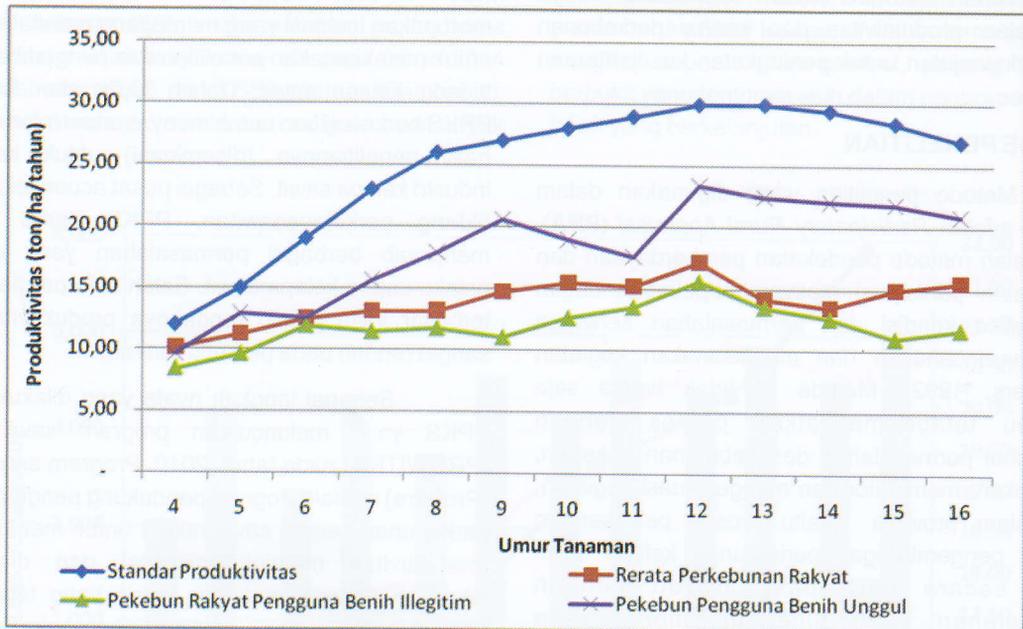
Tabel 1. Pelaksanaan PROWITRA 2010 -2015

Provinsi	2015*	2014	2013	2012	2011	2010	Jumlah
Aceh	3	2	8	4	6	1	24
Sumut	-	2	2	-	1	-	5
Sumbar	2	1	4	4	3	-	14
Riau	3	2	2	1	-	-	8
Jambi	4	1	2	2	3	-	12
Bengkulu	1	1	2	2	2	1	9
Lampung	-	-	-	1	1	-	2
Sumsel & Babel	5	3	-	-	-	-	8
Jumlah							82

Permasalahan Rendahnya Produktivitas Perkebunan Rakyat

Hasil menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas pada perkebunan rakyat sebesar 13,93

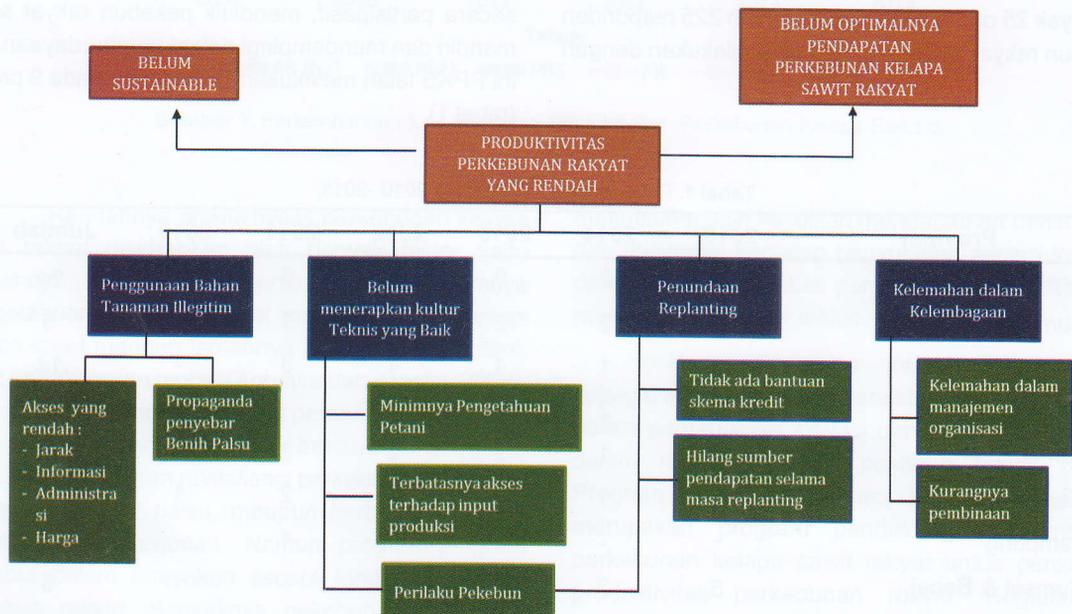
ton/ha/tahun. Produktivitas ini hanya sebesar 55,84% dari standar produktivitas yang ditentukan PPKS pada kelas lahan S3 rerata umur 4-16 tahun yaitu sebesar 24,93 ton/ha/tahun (gambar 2).



Gambar 2. Tingkat Produktivitas Perkebunan Rakyat Petani Responden Prowitra di Sumatera

Berdasarkan hasil kajian PRA, terdapat 4 permasalahan utama rendah produktivitas kelapa sawit rakyat di Indonesia (Gambar 3) yaitu

penggunaan bahan tanaman palsu (illegitim), rendahnya penerapan kultur teknis, perlambatan replanting dan lemahnya institusi/kelompok tani.



Gambar 3. Permasalahan rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia

Penggunaan bahan tanaman Ilegal

Berdasarkan temuan di sentra perkebunan rakyat di beberapa provinsi sampel menunjukkan 60% bahan tanaman yang digunakan oleh perkebunan rakyat di Indonesia bersumber dari bahan tanaman ilegal dan 90% nya merupakan petani swadaya. Bahan tanaman merupakan faktor penting bagi produksi kelapa sawit. Walaupun nilai bahan tanaman hanya 3% dari faktor produksi, akan tetapi memberi dampak yang besar dalam ± 25 tahun ke depan (agustira dkk, 2008). Penggunaan bahan tanaman yang rendah kualitasnya tersebut berdampak pada produksi yang tidak optimal. Menurut Lubis (2008) Potensi produktivitas tanaman dengan bibit asal (ilegal) hanya sebesar 10 – 12 ton TBS/ha/tahun dengan potensi rendemen minyak rendah (16%). Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan produktivitas perkebunan rakyat yang menggunakan benih asal dengan rentang umur tanaman 4-16 tahun hanya sebesar 11,88 ton per ha (gambar 2). Akibatnya, kebun tidak dapat menopang kehidupan petani karena produktivitas rendah dan pengembalian kredit terhambat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) dimana PKS bekerja dibawah kapasitas sehingga biaya olah tinggi.

Maraknya bahan tanaman palsu pada pekebun rakyat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya : kurangnya informasi mengenai pentingnya penggunaan bahan tanaman unggul kepada pekebun, jauhnya sumber benih dengan lokasi perkebunan masyarakat, harga bahan tanaman ilegal yang lebih rendah, propaganda pemalsu bahan tanaman kelapa sawit, serta timbulnya kesan bahwa adanya kesulitan dalam persyaratan administrasi pembelian kecambah langsung dari produsen benih.

Penerapan kultur teknis yang tidak tepat

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat di Indonesia adalah penerapan kultur teknis yang tidak tepat. Beberapa penyebab penerapan kultur teknis yang tidak tepat yaitu :

a. Minimnya pengetahuan pekebun sawit

Terbatasnya pengetahuan pekebun rakyat tidak hanya dalam pemeliharaan tanaman, namun sejak awal pembangunan kebun. Banyaknya pekebun rakyat yang tidak tahu dan tidak juga memperhatikan kesesuaian lahan sehingga pertumbuhan tanaman

tidak optimal, produktivitas rendah, mengganggu lingkungan, serta menghilangkan potensi ekonomi tanaman lainnya. Areal perkebunan rakyat banyak dijumpai pada areal dengan kemiringan yang curam, lahan gambut yang dalam, serta banyaknya konversi lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit. Disamping itu, penerapan kultur teknis juga terjadi pada pemeliharaan tanaman diantaranya:

- Pemupukan yang tidak seimbang (tidak menerapkan 4T: Tepat Jenis, Tepat Cara, Tepat Dosis, dan Tepat Waktu).
- Pengendalian gulma, yaitu pelaksanaan clean weeding yang mengakibatkan pupuk tidak terserap dengan baik dan hilangnya inang bagi predator hama kelapa sawit sehingga biaya pengendalian hama tinggi, atau sebaliknya kurangnya perawatan piringan/gawangan, lebar dan kondisi piringan tidak standar.
- Pekebun tidak menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan lebih mengandalkan bahan kimia. Selain itu lemahnya *Early Warning System* (EWS) terhadap serangan hama dan penyakit juga menjadi kendala dalam perkebunan rakyat.
- Penunasan pelepah yang kurang atau bahkan berlebihan.
- Tidak adanya kastrasi, sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman tidak optimal
- Tidak adanya konsolidasi pada tanaman rusak/abnormal.
- Kendala dalam hal panen, yaitu tidak memperhatikan kriteria kematangan (buah mentah sudah dipanen, maupun buah busuk dikarenakan terlambat panen) yang berpengaruh terhadap rendemen, maupun serangan hama penggerek tandan atau busuk buah.
- Konservasi lahan dan air yang tidak diperhatikan, tidak adanya pemeliharaan tapak kuda, tapak timbun, parit/ drainase, serta pembangunan teras kotur yang tidak sesuai.

Minimnya pengetahuan petani disebabkan minimnya kegiatan penyuluhan yang menyentuh langsung pekebun rakyat, bimbingan dan konsultasi teknis. Minimnya kegiatan tersebut dinas terkait terutama Dinas Perkebunan dan Balai Penyuluhan

Pertanian disebabkan minimnya dana operasional, terbatasnya kualitas dan kuantitas penyuluh pertanian.

b. Akses pekebun rakyat terhadap input produksi

Permasalahan yang dihadapi terhadap rendahnya akses pekebun rakyat terhadap input produksi diantaranya adalah :

- Daya beli rendah terhadap input produksi, dikarenakan produksi TBS masih rendah, lahan yang diusahakan terbatas, serta kurangnya manajemen keuangan usahatani.
- Perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non subsidi yang cukup besar.
- Kualitas pupuk rendah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk yang berkualitas.
- Peredaran pupuk palsu dengan kandungan hara yang jauh di bawah dosis standar.
- Beredarnya berbagai pupuk majemuk yang menjanjikan kenaikan produksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Perilaku pekebun rakyat

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tidak lepas dari karakteristik usahatani kecil. Hasil PRA menunjukkan bahwa karakteristik usahatani tersebut didorong atas perilaku pekebun kelapa sawit rakyat yang masih cenderung dengan pola pikir subsisten dibandingkan komersial. Tantangan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat segi perilaku petani dapat dilihat dari:

- Perubahan lapangan usaha ekstraktif ke usaha budidaya
- Budaya konsumtif di tingkat petani dan lemah dalam pengelolaan keuangan usaha tani
- Tingkat pendidikan dan usia pekebun rakyat menyebabkan kurangnya respon pekebun terhadap inovasi dan adaptasi teknologi yang rendah.
- Kurangnya inisiatif petani dalam melakukan pemeliharaan sesuai dengan BMP.
- Rendahnya kesadaran pekebun rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Menurut Hermanto (2007), karakteristik usahatani subsisten memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Volume penjualan, jumlah pekerja, dan keuntungan kotor relatif kecil;
- Modal usaha biasanya berasal dari perorangan, kelompok kecil, dan rumah tangga;
- Pengelolaan usaha kurang berorientasi pada pengembangan usaha
- Penguasaan IPTEK dan inovasi baru kurang
- Posisi tawar dan persaingan rendah
- Pemilik sering merangkap sebagai pekerja dalam berusaha
- Wilayah operasi dan networking sangat terbatas

Terhambatnya replanting perkebunan rakyat

Perkebunan kelapa sawit rakyat telah berkembang di Indonesia sejak akhir tahun 70-an dan awal 80-an, sehingga sebagian telah berumur lebih dari 25 tahun yang memerlukan *replanting* (peremajaan). *Replanting* tanaman tua diperlukan untuk memperbaiki produktivitas yang umumnya sudah menurun tajam. Namun berbagai permasalahan, menyebabkan *replanting* perkebunan rakyat terhambat. Permasalahan utama *replanting* yang dihadapi oleh perkebunan rakyat diantaranya pemenuhan kebutuhan hidup selama tanaman belum menghasilkan saat *replanting* dan besarnya kebutuhan biaya investasi untuk melakukan *replanting* tanaman. Permasalahan *replanting* khususnya PIR juga disebabkan hubungan kemitraan yang berjalan kurang baik seperti terkait dengan transparansi pengelolaan kemitraan, kurangnya komitmen dalam pemasaran TBS, pembinaan, pengelolaan kredit. Terkait dengan pendanaan untuk membantu pembiayaan investasi *replanting* terkendala dengan administrasi kredit seperti sertifikat lahan seperti yang berpindah tangan kepemilikan ataupun diagunkan, serta tidak ada penjamin terhadap kredit yang diberikan.

Kelemahan dalam kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian pada lokasi perkebunan rakyat di beberapa provinsi sampel, tidak jarang ditemui kelompok tani yang tidak aktif, jika pun aktif hanya sebagai sarana penyalur bantuan atau subsidi dari pemerintah dan perusahaan kepada pekebun rakyat. Kelompok tani yang tidak aktif tersebut didorong karena beberapa faktor, diantaranya

kemampuan manajemen dan usaha anggota kelompok tani yang lemah, faktor sumberdaya manusia (kurangnya pengetahuan tentang organisasi yang baik, kebergantungan terhadap tokoh masyarakat), serta jaringan kerjasama anggota melemah (tidak ada kegiatan bersama, pemecahan masalah secara individu, serta kepercayaan anggota ke pengurus atau sesama pekebun yang semakin lemah). Dengan tidak aktifnya kelompok tani, permasalahan teknis dalam berkebun yang seharusnya dapat diselesaikan secara bersama, menjadi penyelesaian secara individu dengan keterbatasan sumberdaya petani tersebut.

Pelaksanaan Prowitra dalam Mengatasi Permasalahan Produktivitas Perkebunan Rakyat

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit rakyat, maka dilakukan beberapa upaya pelaksanaan kegiatan Prowitra yaitu (i) sosialisasi dan peningkatan akses terhadap bahan tanaman unggul ; (ii) Diseminasi BMP; (iii) Peningkatan kemampuan institusi dan pemberdayaan pekebun rakyat ; (iv) Pembinaan terhadap peremajaan.

Sosialisasi dan peningkatan akses terhadap bahan tanaman unggul

Penyelesaian masalah maraknya penggunaan benih unggul adalah melalui program sosialisasi penggunaan dan mempermudah akses pekebun rakyat dalam memperoleh benih unggul. Program kegiatan tersebut terdiri dari :

a. Mobil keliling

Kegiatan mobil keliling dilakukan seiring dengan kegiatan Prowitra pada sentra perkebunan rakyat secara periodik 3-6 bulan sekali. Kegiatan bertujuan mempermudah akses pekebun rakyat untuk memperoleh benih unggul, memberikan informasi yang benar tentang benih unggul sehingga secara tidak langsung memberantas peredaran benih palsu. Mobil keliling ini telah menjangkau seluruh provinsi di Sumatera dengan jumlah kecambah sawit yang tersebar mencapai 1.692.650 butir (Tabel 2). Dengan penggunaan kecambah kelapa sawit 200 butir/ha, maka Prowitra telah membantu penggunaan benih unggul oleh pekebun rakyat mencapai 8.463 ha. Capaian tersebut belum memperhitungkan dampak multiplier sosialisasi dengan pemesanan dan pembelian benih unggul secara langsung oleh pekebun rakyat ke PPKS

Tabel 2. Penyebaran benih unggul melalui kegiatan mobil keliling Prowitra

No.	Provinsi	Jumlah KKS (butir)					Jumlah Total
		2011	2012	2013	2014	2015*	
1	Aceh	25,513	89,500	62,521	114,324	63,779	355,637
2	Sumatera Utara	5,021	-	-	56,146	-	61,167
3	Riau	-	-	4,097	95,364	130,742	230,203
4	Sumatera Barat	5,119	64,219	85,170	111,959	146,271	412,738
5	Jambi	18,320	38,633	2,538	93,241	229,123	381,855
6	Bengkulu	5,727	8,163	10,250	13,240	25,764	63,144
7	Lampung	-	5,124	-	-	-	5,124
8	Bangka Belitung	-	-	-	76,873	105,909	182,782
Total (Butir)		59,700	205,639	164,576	561,147	701,588	1,692,650

d. mempermudah administrasi pembelian benih pekebum rakyat dan Potongan harga

Permasalahan utama pekebum rakyat yang telah mengetahui lokasi pembelian benih unggul adalah adanya kesan administrasi pembelian yang sulit, pembelian yang harus dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, PPKS sebagai salah satu produsen benih unggul memberikan kemudahan administrasi kepada pekebum rakyat. Persyaratan pembelian hanya dengan melampirkan fotokopi surat keterangan lahan dan KTP. Sedangkan untuk jumlah pembelian dapat disesuaikan dengan kebutuhan pekebum rakyat untuk 1 ha (200 butir). Disamping itu, PPKS memberikan potongan harga sebesar 10% bagi pekebum rakyat.

c. Waralaba bibit

Waralaba bibit bertujuan mempermudah akses pekebum rakyat dalam memperoleh bibit unggul terutama pada sentra pengembangan perkebunan rakyat yang tidak terjangkau mobil keliling. Melalui program waralaba ini pekebum rakyat atau kelompok tani melakukan penggunaan benih unggul PPKS, mendapat pelayanan bantuan teknis dan konsultasi dari PPKS dan berhak meminjam nama PPKS dalam pemasaran bibit. Program ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan pekebum rakyat dalam melakukan pembibitan.

d. Pemberdayaan pembibitan perkebunan rakyat

Banyak program bantuan bibit unggul yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan perkebunan dalam bentuk CSR kurang efisien terkait dengan harga yang disebabkan biaya angkut yang mahal, rentan penyelewengan dan tidak memberdayakan pekebum rakyat karena menerima bibit siap tanam. Untuk memberdayakan pekebum rakyat PPKS melakukan pemberdayaan pembibitan pekebum rakyat. Salah satu kegiatannya adalah dengan program pengadaan benih unggul di Kabupaten Pasaman Barat Sumbar. Dinas perkebunan Pasaman Barat melakukan program bantuan bibit unggul dan penggantian benih unggul dalam bentuk kecambah kepada kelompok tani untuk dilakukan pembibitan. Disamping itu, dinas perkebunan tersebut juga bekerjasama dengan perusahaan perkebunan memberikan bantuan benih untuk dibibitkan. Dalam hal ini PPKS sebagai pendamping dan pembinaan terhadap teknis pembibitan.

e. Outlet ruko

Pembangunan outlet ruko kecambah PPKS bertujuan untuk mempermudah akses pekebum rakyat dalam membeli kecambah pada sentra perkebunan rakyat yang sangat jauh dari produsen benih kelapa sawit. Outlet ruko ini tidak hanya menjual tetapi sekaligus sebagai tempat konsultasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pekebum rakyat. Saat ini terdapat 2 ruko outlet PPKS yaitu di desa Sarudu kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan Lao Bakung Samarinda Kalimantan Timur.

Diseminasi *Best Management Practices* (BMP) yang berkelanjutan

a. Program Diseminasi dan Sosialisasi penggunaan BMP secara berkala

Program ini dilakukan secara berkala 3-6 bulan secara berkala pada sentra perkebunan rakyat. Kegiatan seiring dengan kegiatan mobil keliling Prowitra. Dalam materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kendala dalam penerapan BMP. Dengan penyampaian apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan pekebum, kegiatan diseminasi akan berjalan efektif. Tim prowitra mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan dan kendala pekebum rakyat dalam penerapan BMP dan menyempaiakan materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pekebum rakyat.

b. Penerapan demonstrasi blok (Demblok)

Program diseminasi secara berkala akan dilengkapi dengan penerapan demonstrasi blok. Metode ini merupakan salah satu metode efektif dalam kegiatan diseminasi (Rokayah, dkk,2006). Demonstrasi merupakan suatu metode diseminasi di lapangan dengan memperlihatkan dan membuktikan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan petani (Musyafak, 2005). Prowitra menerapkan sistem demonstrasi blok yaitu memberikan contoh bagi pekebum sekitarnya untuk menerapkan teknologi pada area yang berada di sekitar sentra perkebunan rakyat untuk memberikan contoh bagi pekebum rakyat di sekitarnya. Contoh penerapan Demblok adalah di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasera Sumatera Barat seluas 2,5 ha pada tahun 2012. Penerapan BMP untuk peningkatan produktivitas dan penerapan kultur teknis yang berkelanjutan.

c. Training for trainer bagi penyuluh pertanian

Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian, kegiatan Prowitra melakukan berbagai berbagai program *training for trainer* penyuluh pertanian di berbagai daerah di Sumatera Utara, Riau, dan Sumbar. Hal ini menunjang kesinambungan kegiatan penyuluhan di berbagai senra perkebunan kelapa sawit.

Peningkatan kemampuan kelembagaan dan pemberdayaan pekebun rakyat

Kelembagaan berupa kelompok tani ataupun KUD merupakan perwujudan pertanian terkonsolidasi sehingga bisa memproduksi secara optimal dan efisien. Melalui kelembagaan pekebun/petani sawit pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan permodalan dapat dilakukan secara bersama (Nuryanti dan Dewa, 2011). Melalui insitusi kelompok tani diseminasi teknologi akan lebih efisien karena dapat menjangka pekebun yang lebih banyak dalam satuan waktu tertentu. Melalui penguatan insitusi akan mengefektifkan pemberdayaan pekebun, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pekebun melalui beberapa program yang difasilitasi oleh instansi pemerintah ataupun perusahaan (Hermanto, 2007). Oleh karena itu dalam pelaksanaan Prowitra mementingkan penguatan kelembagaan.

Penguatan kelembagaan melalui Prowitra dilakukan dengan program desa binaan. Program ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan pekebun rakyat. Desa binaan Prowitra telah dilakukan 2011 di Bengkulu Terdapat di 2 desa, yaitu desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dan desa Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Program desa binaan ini telah berhasil membantu pekebun rakyat di Bengkulu melakukan replanting melalui penerapan BMP secara terpadu. Desa binaan lainnya terdapat di nagari Sungai Dareh, Kabupaten Dharmaseraya Sumatera Barat pada tahun 2012. Desa binaan ini telah menjadi program percontohan bagi pengembangan kelapa sawit di desa sekitarnya.

Pembinaan dalam Proses Peremajaan

Program pembinaan dilaksanakan di desa Giri Mulya kabupaten Bengkulu Utara dan desa Babatan kabupaten Seluma. Masing-masing desa dilakukan demonstrasi blok 20 ha. Desa Giri Mulya dibangun dengan metode 60% ditumbang dan 40%

dibiarkan sampai dengan umur tanaman yang ditanam kembali berumur 34 bulan. Sedangkan di desa Seluma dilakukan dengan tumbang serempak. Hasilnya, metode 60 : 40 berhasil lebih baik di desa Giri Mulya. Namun dari beberapa indikator hal tersebut bukan terkait dengan masalah teknis namun lebih disebabkan terkait dengan faktor kelembagaan pekebun rakyat. Faktor kelembagaan yang kuat sangat berpengaruh dalam kegiatan replanting tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan cara efektif dalam pemberdayaan pekebun, meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan pekebun melalui suatu program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prowitra sebagai sarana diseminasi teknologi penelitian dari PPKS dapat dilakukan sebagai alternatif pengembangan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Kunci sukses pelaksanaan Prowitra adalah mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan pekebun rakyat. Disamping itu peran penguatan kelembagaan perkebunan rakyat sangat berperan penting dalam pengefektifan diseminasi teknologi, pemberdayaan pekebun, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun rakyat.

Prowitra membantu pemerintah dalam membina dan meningkatkan kualitas SDM pekebun rakyat sehingga produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat maupun nasional dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustira M.A, Kurniawan A., Dja'far, Siahaan D. Wahyono. T. 2008. Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan
- Agustira M.A dan Amalia, R 2012. Kendala Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 17 (1) 2012: hal 21-29
- Badrun, M. 2010. Tonggak Perubahan : Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan
- Chambers R 1992. Rural appraisal : Rapid, Relaxed, and Participatory. IDS Discussion Paper 331. Accessed through <http://opendocs.ids.ac.uk> May 29th 2012.



- Ditjenbun.2014. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2012 – 2013.Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
- Hermanto .2007. Rancangan Kelembagaan Tani dalam Implementasi Primatani di Sumatera Selatan. Analisa Kebijakan Pertanian. Vol 5 (20) Juni 2007 : 110-125
- Koentjaraningrat. 1997.Kebudayaan, Mentalitas dalam Pembangunan.Jakarta : Gramedia.
- Lubis, A.U. 2008. Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Indonesia edisi 2. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan
- Musyafak.A. 2005. Strategi percepatan Adopsi dan Difusi Inovasi Pertanian Mendukung Prima Tani. Analisa Kebijakan Pertanian. Volume 3 (1) 2005:20-37.
- Nuryanti, S dan Dewa K.S.S.. 2011 Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 29(2) 2011;115-128
- Rahman, A. 2015. Komitmen Pelaku Kemitraan terhadap Efisiensi dan Keberlanjutan Usahatani Kelapa Sawit Plasma. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2015 Palembang 8-9 Oktober 2015
- Rokayah, E., Susi M, dan Sukmayana. 2006 Diseminasi melalui Demontrasi penerapan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu padi.Temu Teknis Nasional Tenaga Fungsional Pertanian. Pusat penelitian dan Pengembangan peternakan. Bogor